

KETIMPANGAN UTARA-SELATAN DALAM GLOBALISASI

Wasisto Raharjo Jati¹

Abstract

This article aims to analyze the economic inequality in globalization. Inequality resulted poverty, income inequality, and debt increased for a third world country. These Implications indicates the unequal process about globalization between developed countries and the third world countries. Developed countries getting richer meanwhile third world countries get poorer. This article will elaborate more depth the process of globalization between developed countries and the third world countries.

Keywords : *globalization ; developed countries ; third world countries ; economic inequality*

Abstraksi

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi dalam globalisasi. ketimpangan tersebut menghasilkan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan hutang yang meningkat bagi negara dunia ketiga. Implikasi tersebut mengindikasikan proses globalisasi yang tidak setara antara negara maju dan negara dunia ketiga. negara maju semakin kaya sementara negara miskin semakin miskin. Artikel ini secara lebih mendalam akan mengelaborasi proses globalisasi antara negara maju dan negara dunia ketiga.

Kata-kata Kunci : *globalisasi ; negara maju ; negara dunia ketiga ; ketimpangan ekonomi*

¹ Alumni Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, bisa dihubungi di email wasisto.raharjo.jati@gmail.com

Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi politik internasional, relasi utara-selatan merupakan premis mendasar dalam melihat ketimpangan dan marjinalisasi di negara dunia ketiga. Utara-Selatan atau dalam istilah populernya dikenal sebagai *global north* dan *global south* merupakan dikotomi yang mewakili adanya divergensi yang terdapat dalam arena globalisasi. Isu Utara-Selatan dalam globalisasi setidaknya penting di awal untuk dibicarakan mengingat isu ini menjadi krusial paska perubahan geopolitik dunia pada tahun 1990-an dengan ditandainya Blok Barat memenangi perang ideologi dengan Blok Timur sehingga memunculkan globalisasi sebagai bentuk westernisasi nilai-norma Barat.

Barat kemudian tampil menjadi kekuatan superior dalam perekonomian terlebih setelah perdagangan bebas diberlakukan pada 1994 seiring dengan disahkannya NAFTA yang kemudian diikuti dengan tumbuhnya blok perdagangan bebas lainnya. Hal lain yang menjadi faktor penting adalah Konferensi WTO di Doha pada 2001 dimana terdapat standar ganda dalam aturan perdagangan dunia dimana negara dunia ketiga dikenai aturan pengurangan tarif ekspor dan dilarang melakukan proteksionisme pasar agar komoditas negara maju bisa masuk secara bebas dan leluasa. Sedangkan bagi negara maju tetap mengenakan hambatan tarif bagi komoditas negara dunia ketiga dan mengenakan proteksi terhadap produk pertanian negara dunia ketiga yang merupakan penopang pendapatan nasional utama. Oleh karena itulah dengan mencermati aturan tersebut, polarisasi dunia kini tidak lagi berputar pada perseteruan ideologi antara Barat (kapitalis) dengan Timur (komunis) akan tetapi lebih pada persoalan ketimpangan ekonomi antara Utara (negara maju/kaya) dengan Selatan (negara berkembang/miskin)².

Globalisasi yang telah dibahas merupakan gelombang modernisasi maupun kapitalisme sekaligus juga pembaharuan gagasan neoklasik dengan konteks liberalisasi dan fundamentalisme pasar. Maka negara yang memegang kendali dua hal tersebutlah yang menjadi aktor utama dalam globalisasi. Mengenai faktor neoklasik tersebut, terbentuknya Utara-Selatan sendiri tidak terlepas dari legasi imperialisme Eropa Barat terhadap berbagai negeri di Asia, Afrika, dan Amerika Latin merupakan implikasi kebijakan dari teori ekonomi klasik yang mengemukakan bahwa proses reproduksi dan akumulasi akan terhenti apabila pasaran barang sudah menjadi terbatas³. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya ekspansi pasar dalam menemukan daerah pemasaran baru untuk dimaksimalkan profitnya sehingga terjadilah akumulasi kapital. Logika inilah yang kemudian menjadi pionir dasar dalam globalisasi dimana esensi lintas batas (*trans border relations*) maupun nirbatas (*open border relations*) lebih dimaknai sebagai intensifikasi pasar yang semakin mendalam (*deepen*) dan melebar (*stretching*) merupakan proses bekerjanya globalisasi. Oleh karena itulah, karena sudah menjadi proses sejarah, keberadaan globalisasi menjadi tidak bisa dihindari dan terelakkan.

Hal itulah mengapa *global north* dan *global south* masih relevan diperbincangkan dalam mengkaji globalisasi kontemporer. Beberapa akdemisi kritis juga konsen dengan dikotomi tersebut dalam analisis globalisasi seperti halnya John Glenn (2007) *Globalization : North-South Perspective*, Jan Nederveen Pieterse (2004) *Globalization or Empire*, maupun Martin Khor (2005) *Globalisation*

² Jane Pollard, Cheryl McEwan, *Postcolonial Economies*, New York : Zed Books, 2011, hlm. 124.

³ Arif, Sritua, *Negeri Terjajah : Menyingkap Illusi Kemerdekaan*, Yogyakarta : Resist Books, 2006, hlm. 52.

and the South: Some Critical Issues. Mayoritas ketiga akademisi menilai proses globalisasi yang konon katanya membawa semangat modernitas baru yang lebih egaliter dan membawa dampak universal, namun menimbulkan adanya divergensi antara kawasan utara yang notabene merupakan negara maju dan kawasan selatan yang menyimbolkan negara dunia ketiga. Glenn menilai divergensi tersebut merupakan bentuk ketidaksanggupan bagi negara Selatan untuk bersaing ekonomi secara terbuka dengan Utara yang notabene negara kaya dan maju⁴. Ketidaksanggupan tersebut terjadi lantaran krisis hutang yang mendera ditambah progam penyesuaian ekonomi yang disarankan IMF dan Bank Dunia tidak berjalan dengan baik. Tidak jauh berbeda dengan Glenn, Khor menganalisis divergensi Utara-Selatan tersebut terjadi karena dominasi pelaku ekonomi internasional (IMF, MNCs, WTO, dan Bank Dunia) yang terlalu kuat dalam mempengaruhi kebijakan perekonomian nasional Selatan⁵. Akibatnya adalah perekonomian domestik yang dijalankan borjuasi lokal kalah bersaing dengan borjuasi asing yang ikut masuk berinvestasi memperebutkan kue globalisasi. Sementara bagi Pieterse menilai divergensi Utara-Selatan muncul karena adanya benturan (*clash*) dua peradaban yang berbeda yang tidak adil dan seimbang karena terdapat benih-benih konflik yang diakibatkan pengalaman panjang kolonialisme⁶. Hal inilah yang membuat globalisasi sendiri dimaknai secara hierarkis dan bukannya universal-pluralis sebagaimana yang diajarkan ajaran modernitas. Terdapat ruang hierarkis yang terpola secara vertikal dalam arena tersebut dimana makna saing-bersaing dalam globalisasi berubah menjadi makna kuasa-menguasai.

Maka secara garis besar, tulisan dalam paper ini akan membedah konteks Selatan dalam globalisasi terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan kedudukan Selatan dalam geopolitik dunia dan selanjutnya bagaimana tantangan yang dihadapi Selatan dalam globalisasi. Selatan tidaklah dimaknai secara harfiah sebagai arah mata angin saja, namun dalam konteks ilmu politik, Selatan merefleksikan suatu pertentangan dalam relasi geografis tertentu dimana terdapat kesenjangan yang perlu diulas disana.

Konteks Negara Selatan (*South*) dalam Geopolitik Dunia

Membincangkan masalah negara kawasan Selatan dalam kondisi globalisasi kontemporer tidaklah terlepas dari kondisi pembilahan kondisi klasifikasi dunia paska Perang Dunia II berakhir pada tahun 1950 yang kemudian memunculkan tiga kelas negara yakni negara dunia pertama yang mewakili Blok Kapitalis Barat, negara dunia kedua yang menyimbolkan Blok Komunis Timur, dan negara dunia ketiga yang merupakan kelompok netral / non-blok. Adapun pengklasifikasian tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian masing-masing negara dimana negara dunia pertama berada di level puncak dalam perekonomiannya, negara dunia kedua berada di level menengah, dan negara dunia ketiga yang berada di level bawah. sehingga bisa dikatakan masih lemah perekonomiannya dan umumnya penduduknya mayoritas miskin.

Adalah Alfred Sauvy, seorang ahli demografis Prancis yang mempopulerkan ketiga istilah tersebut yang terinspirasi dari masyarakat pra revolusi Prancis yang dikenal dengan "*tiers etat*" yakni kelas pertama biarawan, kelas kedua bangsawan, dan kelas ketiga borjuasi. Adapun konsep "*tiers etat*" mengalami perubahan paska revolusi Prancis pada abad 18 dimana kekuasaan oligarkis yang

⁴ Glenn, John, *Globalization : North-South Perspective*, London : Routledge., 2007, hlm. 112.

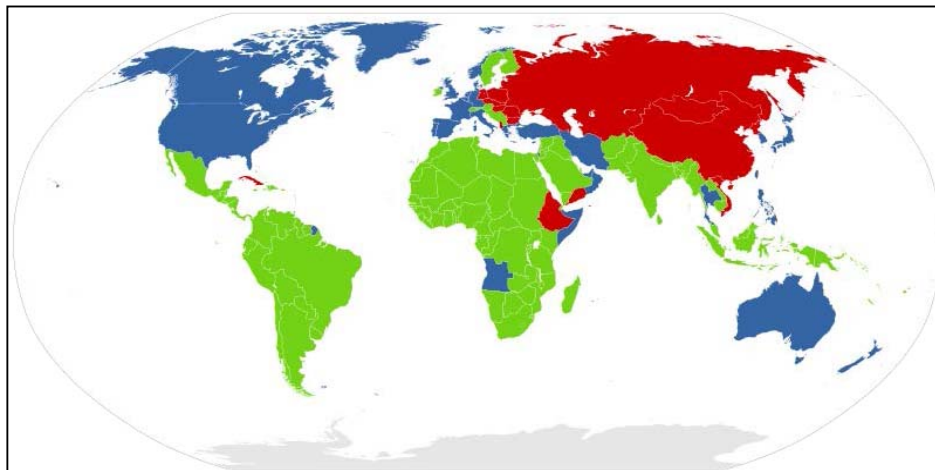
⁵ Khor, Martin, *Globalisation and the South: Some Critical Issues*, Penang Third World Networks, 2005, hlm. 85.

⁶ Pieterse, Jan Nederveen, *Globalization or Empire*, London : Routledge, 2004, hlm. 108.

dikuasai biarawan dan bangsawan dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan borjuasi. Dalam konsep “*tiers etat*” yang terbaru, borjuasi menempati kelas masyarakat pertama, birokrasi menempati kelas kedua, dan buruh menempati kelas ketiga yang diasosiasikan sebagai kelas masyarakat miskin dan termarginalkan secara ekonomi (*economic excluded*). Sauvy kemudian merefleksikan kondisi kelas ketiga itu terhadap kondisi negara-negara baru paska dekolonisasi Eropa yang perekonomiannya masih *chaotic* paska revolusi kemerdekaan⁷.

Oleh karena itulah dari analogi Sauvy tersebut, kita bisa melihat bahwa konstruksi miskin dan masih berkembang melekat pada kondisi negara dunia ketiga dalam konteks geopolitik dunia. Miskin dan masih berkembang membutuhkan adanya pembangunan dan perlu dimodernisasi, begitulah yang menggelayut di alam pikiran para petinggi dunia pertama dan dunia kedua untuk memperebutkan pengaruhnya di negara dunia ketiga. Dengan kata lain yang menjadi pengetahuan publik tentang dunia ketiga adalah entitas geopolitik warisan kolonialisme dan tersubordinatkan dalam sistem kapitalisme dunia dengan kondisi negaranya yang masih miskin dan ekonominya masih berkembang⁸. Namun demikian tak selamanya kondisi miskin dan masih berkembang melekat pada konstruksi dunia ketiga, akan tetapi juga munculnya semangat resistensi yang dikumandangkan para pemimpin dunia ketiga seperti Soekarno, Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, maupun Gamal Abdul Nasser yang membentuk sikap oposisi terhadap segala bentuk pengaruh asing yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme dan netralitas terhadap blok (*non-alignment*). Jadi dalam membahas kondisi paska kolonial yang dihadapi negara dunia ketiga, negara dunia ketiga sendiri menghadapi dilema antara resistensi terhadap pengaruh asing dan mengalami dominasi ekonomi asing.

Gambar 1. : Peta Geopolitik Dunia 1945-1991



Keterangan : Biru (Negara Dunia Pertama), Merah (Negara Dunia Kedua).
Hijau (Negara Dunia Ketiga)

Sumber : [upload.wikimedia.org/wikipedia/commonsCold_War_alliances_mid-1975.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/Cold_War_alliances_mid-1975.svg)

⁷ Jacqueline Stevens, “Recreating the State”, *Third World Quarterly* 27:5 (2006), hlm 755-766.

⁸ Mark Berger, “After The Third World ? History, Destiny, and The Fate of Third Worldism”, *Third World Quarterly* 25 : 1 (2004), hlm 9-39.

Istilah “negara dunia ketiga” (*third world countries*) sendiri untuk menyebutkan dilema tersebut kurang lebih menimbulkan perdebatan multiinterpretasi.). Istilah dunia ketiga masih kurang menonjolkan dimensi ketimpangan dan marginalisasi yang diakibatkan ekspansi kapitalisme global⁹. Hal ini mengingat konteks dunia ketiga yang mewakili kawasan Trikontinental yakni Asia, Afrika, dan Amerika Latin ini banyak mengalami perubahan signifikan terutama pada era 60-80an. Perubahan tersebut meliputi masuknya negara-negara Asia dan Amerika Latin menjadi negara dunia kedua / pengikut blok komunis seperti halnya China, Vietnam, dan Kuba maupun yang beralih fungsi menjadi negara dunia pertama / negara kapitalis seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan yang menjadi negara industrialisasi baru (*newly industrializing countries*) sehingga memunculkan sebutan Macan Asia. Macan Asia sendiri setidaknya menjadi anomali dalam membahas ketimpangan dan marginalisasi dunia ketiga. Macan Asia tidak terlepas dari kondisi internal pemerintahan negara-negara tersebut yang mengkombinasikan model pembangunan neoliberal berbasiskan pada produk lokal dengan penguasaan teknologi¹⁰. Penguasaan teknologi menjadi kata kunci untuk menjawab fenomena Macan Asia. Mereka sadar bahwa kondisi negaranya tidak dikaruniai sumber daya alam sehingga lebih terpacu untuk menguasai perkembangan teknologi dan informasi. Sementara Asia Timur sibuk pada teknologi dalam membangun ekonomi, Amerika Latin dan Afrika lebih memperkuat eksploitasi sumber daya alamnya sebagai basis pembangunan ekonomi. Hal itulah yang kemudian menimbulkan transformasi ekonomi dimana Asia Timur mampu meningkatkan daya saing ekonomi sehingga mampu mereduksi “kutukan” ketimpangan dan marginalisasi ekonomi sedangkan Amerika Latin dan Afrika semakin terjerembab pada ketimpangan dan marginalisasi ekonomi karena daya saing ekonomi mereka melemah karena hasil sumber daya alam dihargai lebih rendah daripada produk olahannya. Lebih dari itu, Amerika Latin dan Afrika juga tidak mempunyai basis teknologi untuk mengolah sumber daya alam sehingga kian terjerembab pada ketimpangan tersebut.

Oleh karena itulah, pengamatan kondisi ketimpangan dan marginalisasi dalam geopolitik dunia tidaklah lagi merujuk pada letak geografis yang selama ini menjadi pakem, akan tetapi ketimpangan sendiri kini lebih dikarenakan kondisi perekonomian dan pendapatan nasional. Maka untuk menjembatani hal tersebut dan mengatasi kebingungan itu, Willy Brandt (1980) dalam *North-South: a programme for survival* mengembangkan model Utara-Selatan sebagai bentuk personifikasi ketimpangan dan marginalisasi tersebut. Utara diidentikkan dengan “negara dunia pertama” merupakan negara maju / kaya dengan penguasaan teknologi sedangkan Selatan diidentikkan dengan “negara dunia ketiga” yang miskin dan dalam tahap berkembang dalam membangun ekonominya¹¹. Maka dikotomi Utara-Selatan sendiri juga identik dengan dikotomi negara maju (*developed countries*) dan negara berkembang (*developing countries*) dengan tolok ukur kemajuan pembangunan ekonomi yang menjadi tolok ukurnya. Brandt menyebutkan bahwa negara Selatan yang umumnya merupakan negara bekas jajahan mengalami masalah pelik dalam membangun ekonomi dan memerlukan dukungan Barat untuk hadir memberikan asistensi di sana.

⁹ Berberoglu, Berch, *Globalization in The 21st Century*, New York, Palgrave, 2010, hlm 56.

¹⁰ Berger, Mark, *The Battle of Asia : From Decolonization to Globalization*, London : Routledge, 2004, hlm 114.

¹¹ Therien, Jean-Philippe, “Beyond the North-South divide: the two tales of world poverty”, *Third World Quarterly* 20:4 (1999), hlm 723-742.

Gambar 2. : Peta Geopolitik Dunia 1991-sekarang



Keterangan : Biru (Negara Utara / Maju) dan Abu-Abu (Negara Selatan / Miskin)

Sumber : en.wikipedia.org/wiki/File:Developed_nation

Laporan Brandt tersebut tentang Utara-Selatan tersebut berkembang menjadi inisiatif mayoritas dan dokumen kunci bagi para elite politik negara maju untuk mengatur (*managing*) perekonomian negara dunia ketiga. Dimensi “pengaturan” tersebut meliputi pengabdian konsep pasar bebas dan deregulasi negara karena menilai selama ini pasar tidak berkembang bebas karena diintervensi negara, biarkan swasta asing masuk berinvestasi membangun ekonomi, dan liberalisasikan semua barang publik menjadi barang privat. Adapun konteks pengaturan tersebut menjadi diskursus yang hegemonik karena didukung secara politis (*backed up*) oleh lembaga dunia seperti ILO, UNCTAD, UNDP, Bank Dunia, maupun IMF sehingga konteks pengaturan ini kemudian menjadi lancar dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, padahal sejatinya untuk mengeruk kekayaan negara-negara dunia ketiga.

Hal yang bisa kita mengerti tentang makna Selatan dalam konteks geopolitik dunia adalah kondisi dilematis antara dominasi dan resistensi yang dihadapi negara yang notabene merupakan negara paska kolonial. Resistensi merupakan cara membangun ekonomi secara mandiri tanpa campur tangan asing, namun tidak punya modal dan faktor produksi yang kuat. Sementara dominasi adalah negara mengalami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat, namun karena adanya campur tangan negara maju yang kuat dalam perekonomian nasional. Maka di antara dilema dominasi dan resistensi tersebut, saya ingin menilai bahwa konteks pembangunan menjadi krusial dibicarakan dalam pemaknaan Selatan dalam konteks globalisasi sekarang ini. Pembangunan merupakan kata kunci penting bagaimana kita memahami selanjutnya dikotomi Utara-Selatan karena pembangunan merupakan cara ampuh mereduksi ketimpangan dan marjinalisasi tersebut. Dalam hal ini ada banyak uraian ulasan perspektif untuk menjelaskan mengapa Selatan mengalami ketertinggalan pembangunan dengan Utara yang akan saya jelaskan dalam tulisan sub-bab berikutnya.

Dikotomi *Core-Periphery* sebagai Ketimpangan Pembangunan Selatan

Pembangunan diidentikkan dengan linearitas perkembangan peradaban suatu bangsa dan masyarakat. Logika linearitas tersebut menuntun pemahaman kita bahwa pembangunan adalah bagian tidak terpisahkan dari pergerakan kehidupan yang senantiasa bergerak maju. Maka, membicarakan masalah pembangunan sendiri identik dengan proses historis karena pada esensinya pembangunan merupakan kritik atas kondisi masyarakat yang masih feodalistik. Karakteristik ekonomi feodal berbasis hasil agrikultural mengalami stagnasi karena keterbatasan modal dan faktor produksinya yang sepenuhnya dikontrol oleh negara melalui biarawan dan bangsawan. Kapitalisme kemudian hadir sebagai ideologi pembebasan yang kemudian menjadikan dimensi pembangunan menjadi lebih dinamis dan efisien dikarenakan semua orang bisa berekspresi secara bebas dalam proses pembangunan. Hal inilah kemudian memuntun adanya spesialisasi dan penemuan teknologi terbaru sehingga menjadikan kapitalisme menjadi model utama pembangunan ekonomi suatu negara.

Namun demikian, pembangunan ekonomi berbasis kapitalisme menjadi dilematis manakala kapitalisme sendiri diterapkan di kawasan non Eropa-Amerika yang notabene kondisi sosio-ekonominya jauh berbeda dengan Eropa. Kapitalisme hadir di kawasan Selatan dalam bentuk pembentukan koloni sebagai bentuk aplikasi ekonomi neo-klasik yakni mencari pasar dan mengamankan faktor produksinya di luar dan penduduk domestik hanya menikmati hasil pembangunan yang kecil dari ekspansi kapitalisme tersebut karena minimnya modal dan faktor produksi. Hal inilah yang kemudian yang menjadikan pembangunan menjadi kontradiksi untuk dibicarakan dalam berbagai kasus-kasus pembangunan di kawasan negara paska kolonial dan salah satu bentuk riil dari kontradiksi tersebut adalah dikotomi pusat (*core*)-pinggiran (*periphery*) yang hingga kini masih menjadi perdebatan menghangat di kalangan akademisi dunia ketiga terlebih dalam masa globalisasi kini dimana *core-periphery* tersebut menunjukkan adanya polarisasi kesejahteraan dan kemakmuran antar berbagai negara dunia.

Penjelasan mengenai *core-periphery* untuk mengetahui kondisi ketimpangan dan marjinalisasi pembangunan ekonomi dapat kita tinjau dari berbagai perspektif *mainstream* yang kritis terhadap implementasi globalisasi di dunia ketiga terutama pendekatan historis-materialis maupun strukturalis. Ditinjau secara historis, dikotomi *core-periphery* sendiri diintrodusir oleh Raul Prebisch pada tahun 1945, seorang ekonom Argentina dari *Economic Commission for Latin America (ECLA)* yakni sebuah organisasi internasional di bawah naungan PBB untuk mempromosikan pembangunan dan modernisasi di Amerika Latin. Prebisch menilai dikotomi *core-periphery* tersebut tercipta karena pola pertukaran tak seimbang (*unequal exchange*) antara negara pusat dan pinggiran dalam perdagangan internasional. Perukaran tersebut terindikasi dari negara dunia ketiga harus mengekspor barang mentah sebanyak mungkin untuk bisa melanjutkan impor barang industri / komoditas olahan dalam jumlah sama. Dari situ kemudian, terjadi *gaps* antara barang mentah dan barang jadi dimana negara pusat memperoleh nilai surplus sementara negara pinggiran mendapatkan nilai defisit dari interaksi perdagangan tersebut. Adapun saran Raul Prebisch tentang Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) untuk menekan ketimpangan tersebut menjadi sia-sia karena negara pinggiran mengalami ketergantungan ekonomi terhadap barang modal dan teknologi dari negara pusat untuk membangun perekonomiannya.

Ditinjau dari gagasan ekonomi-politik klasik, *core-periphery* sebagai bentuk ketimpangan pembangunan ekonomi bagi Utara-Selatan menjadi *concern* bagi beberapa pendekatan historiko-materialis seperti teori ketergantungan, teori sistem dunia, maupun teori pertukaran tidak seimbang. Bagi pandangan teori ketergantungan Marxis seperti Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Rudolfo Stavenhagen, Vasconi, Ruy Mauro Marini dan F.H. Cardoso menilai *core-periphery* sendiri berasal struktur eksternal dunia yakni dalam konteks ekspansi kapitalisme asing ke berbagai penjuru dunia yang menimbulkan kontradiksi. Adapun kontradiksi tersebut hal yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi berbasis kapitalisme dimana selalu ada pihak yang kalah dan menang dalam kompetisi bebas. Masalahnya ialah kompetisi dan kalah-menang tersebut terjadi dalam konteks yang timpang dimana terjadi perbedaan faktor produksi yang mencolok antara negara pusat yang sudah berada dalam “pendewasaan ekonomi” (*economic maturity*) dan pinggiran yang masih dalam pergulatan antara pra-kapitalis menuju kapitalis. Akibatnya surplus pembangunan sendiri lebih banyak ke pusat daripada ke pinggiran. Oleh karena itulah, pembangunan (*development*) sendiri berlaku bagi negara pusat dan keterbelakangan (*underdevelopment*) bagi negara pinggiran. Revolusi sosialisme bagi kelompok teoritikus ini merupakan cara untuk memutus *core-periphery* melalui penyitaan aset / nasionalisasi swasta asing yang merupakan akar ketimpangan tersebut.

Adapun bagi teoritikus ketergantungan neo marxis seperti Celso Furtado, Halio Jaguaribe, Anibal Pinto dan Osvaldo Sunkel menilai dimensi *core-periphery* ini tercipta dari kondisi intern negara yang kemudian menciptakan borjuasi komprador. Munculnya borjuasi komprador yang merupakan warisan kolonialisme ekonomi masa lampau dituding menjadi akar ketimpangan dimana perannya sebagai *agency* yang memuluskan transfer surplus dalam skala besar ke negara pusat. Adapun mental *inlander* yang diperlihatkan oleh borjuasi komprador yang notabene merupakan borjuasi domestik yang lebih melayani kepentingan asing daripada kepentingan nasional dikarenakan laba yang mereka peroleh lebih besar dari perdagangannya dengan pihak asing daripada di negeri sendiri yang perekonomiannya tidak stabil. Maka hal yang bisa dapat dilakukannya untuk memutus *core-periphery* tersebut adalah dengan “menghapuskan” borjuasi komprador tersebut dengan memperkuat borjuasi-borjuasi nasional yang didukung eksistensinya oleh negara dalam mengelola pasar dan perekonomian.

Sedangkan bagi teoritikus sistem dunia dan pertukaran tidak seimbang seperti Barry K. Gills, Immanuel Wallerstein, dan Samir Amin, konteks *core-periphery* tercipta karena sistem dunia yang tersusun atas negara metropolis dan negara satelit. Sistem dunia merupakan proses historis ekspansi kapitalisme yang menghasilkan pembangunan (*development*) bagi negara metropolis dan keterbelakangan (*underdevelopment*) bagi negara satelit dimana antara pembangunan dan keterbelakangan tersebut saling berkorelasi yang merupakan esensi dari pembangunan total kapitalisme. Adanya realita *underdevelopment* inilah yang dikatakan Samir Amin sebagai bentuk kegagalan pembangunan (*maldevelopment*) yang terjadi di Selatan. Menurut Amin, kondisi *maldevelopment* sebagai bentuk relasi eksploitasi yang dihasilkan dari sistem dunia tersebut. Relasi eksploitasi tersebut dikarenakan terjadi pembiaran yang terus-menerus akan pola pertukaran tidak seimbang tersebut¹². Negara Barat berupaya untuk melanggengkan pola tersebut supaya secara kontinu dapat mengeruk laba yang besar. Akibatnya yang terjadi kondisi ekonomi pinggiran di

¹² Amin, Samir, *Global History : A View From The South.*, Nairobi : Pambazuka Press, 2011, hlm. 84.

Selatan menjadi tidak berkembang monopoli faktor produksi dari Utara sehingga kue pembangunan sendiri tidak merata antara Utara dan Selatan. Maka pada akhirnya tesis *trickle down effect* yakni kue itu akan merembes hingga bawah tidak terjadi malahan yang terjadi ialah *trickle up effect* dimana dari hasil ketimpangan tersebut yang eksploitatif tersebut, kekayaan Selatan diabsorpsi oleh Utara.

Adapun permasalahan *core-periphery* sendiri coba diangkat dalam berbagai analisis dampak globalisasi kontemporer untuk menjelaskan ketimpangan seperti Ray Kelly (2005) *Globalisation and Third Worlds*, Ankie Hoogvelt (2001) *Globalization and The Postcolonial*, maupun Alex Callinicos (2009) *Imperialism and Global Economy*. Kelly menilai *core-periphery* terjadi karena minimnya kesempatan bagi negara dunia ketiga / Selatan untuk ikut berandil dalam proses alur kebijakan globalisasi. Utara terlalu mendominasi sepenuhnya lembaga-lembaga dunia sehingga dengan mudah menginternalkan kepentingan nasionalnya menjadi kepentingan global¹³. Hal inilah yang kemudian menjadi Utara menjadi kekuatan hegemonik dalam ekonomi global dan menjadikan Selatan hanya menjadi objek dari kebijakan tersebut. Adapun munculnya Utara sebagai kekuatan hegemonik juga menjadi ulasan Callinicos yang menilai Utara merepresentasikan cara-cara imperialisme dalam relasi ekonomi global. Mekanisme imperialisme Utara melalui mengglobalnya Amerika dalam berbagai urusan perekonomian. Melalui mata uang dollar yang menjadi nilai tukar, penerapan suku bunga The Fed, maupun perdagangan pasar modal baik di Nasdaq maupun NYME, Amerika Serikat tampil sebagai regulator perekonomian dunia¹⁴.

Sedangkan bagi Hoogvelt, *core-periphery* sendiri terjadi karena pola disruptif ekonomi yang ditimbulkan oleh masuknya ekonomi swasta asing ke negara-negara Selatan. Letak disruptifnya terletak pada pelaku pasar yang cirinya antara lain kompromi terhadap pasar, kebijakan pintu terbuka untuk mendorong investasi dan perdagangan internasional, serta berorientasi pada ekspor tanpa memperdulikan penguatan ekonomi nasional dalam globalisasi¹⁵. Selatan menjadi subordinasi bagi desentralisasi kapitalisme yang dilakukan Utara dalam rangka mengefisienkan pola industrialisasinya dengan memindahkannya ke Selatan. Adapun Selatan yang kaya dengan buruh murah dengan kerja maksimal menjadi jalan eksploitasi baru itu. Tentunya kita bisa melihat dari berbagai fenomena yang ada telah menjadi ulasan berbagai aktivis buruh migran maupun aktivis lingkungan dimana penjualan sumber daya yang murah maupun eksploitasi jam kerja buruh dengan sistem "lepas daya" (*outsourcing*) memberikan dampak destruktif bagi perekonomian. Meskipun secara makro ekonomi, negara mengalami kenaikan pendapatan dan pertumbuhan instan, namun kedua hal itu lebih banyak ditopang oleh kekuatan asing. Akibatnya setelah semuanya terkuras habis, Selatan kemudian menjadi kekuatan impoten dalam peredaran ekonomi dunia dan menempatkan dirinya lagi menjadi abdi asing. Dalam hal ini, dimensi *core periphery* tidak hanya untuk dibicarakan membahas masalah ketimpangan pembangunan ekonomi Utara-Selatan, namun juga bagaimana kita melihat dimensi riil dalam berbagai aspek lainnya. Sehingga perbincangan Utara-Selatan sendiri tidak cukup hanya berbicara ketimpangan dalam level makro saja, akan tetapi

¹³ Ray Kiely, Phil Marfleet, *Globalisation and Third Worlds*, New York : Taylor and Francis Group, 2005, hlm 37.

¹⁴ Callinicos, Alex, *Imperialism and Global Political Economy*, Cambridge : Polity Press, 2009, hlm 188.

¹⁵ Hoogvelt, Ankie, 2001, *Globalization and The Postcolonial World*, London: Palgrave, 2001, hlm 156.

melihat di sekitar kita. Untuk itu, dalam tulisan ini saya akan mengajak pembaca bagaimana melihat dimensi riil dari ketimpangan Utara-Selatan tersebut dalam globalisasi sekarang ini.

Membicarakan ketimpangan pembangunan sebagai implikasi dari globalisasi di kawasan Selatan perlu dibicarakan dalam bingkai proporsional karena menguak masalah tersebut mengandung kompleksitas tersendiri. Hal ini dikarenakan ada banyak aspek definitif yang bisa diuraikan dalam menjelaskan ketimpangan. Namun dalam tulisan ini, saya ingin mengintrodukir berbagai aspek yang menjadi krusial dibicarakan dalam membicarakan aspek ketimpangan Utara-Selatan diantaranya adalah masalah perdagangan bebas, pendapatan perkapita, dan masalah kemiskinan

Ketimpangan Perdagangan Bebas

Masalah perdagangan bebas yang tidak adil dan tidak seimbang merupakan skope yang banyak dibicarakan oleh para kritikus globalisasi, salah satunya yang paling vokal adalah Joseph Stiglitz. Stiglitz notabene mantan penasihat ekonomi Presiden Clinton / mantan petinggi Bank Dunia ikut merancang konsep perdagangan bebas pada tahun 1994 kini ikut menjadi barisan terdepan dalam mengkritisi konsep yang dibangunnya tersebut. Joseph Stiglitz dalam *Globalization and Discontents* menyebutkan aturan perdagangan bebas yang diatur WTO sebenarnya tidak adil dan diskriminatif¹⁶. Stiglitz menyebutkan salah satu ketimpangan yang terjadi adalah dalam kasus perdagangan komoditas pertanian. Dalam putaran perundingan WTO di Doha, isu pertanian global menjadi perdebatan sengit antara negara Utara dan negara Selatan. Sumber perdebatan terletak pada negara – negara Selatan yang dipaksa untuk menghentikan subsidi kepada para petani dan liberalisasi perdagangan pertanian supaya komoditas pertanian negara maju bisa masuk. Sebaliknya terdapat pembatasan terhadap komoditas pertanian negara dunia ketiga untuk memasuki pasar pertanian negara maju karena dikhawatirkan akan menggerus pasar konsumsi domestik. Paska kesepakatan perdagangan bebas WTO di Uruguay, negara Utara mengalami keuntungan berlipat sedangkan negara Selatan mengalami kerugian.

Tabel 3: Perdagangan Bebas Pertanian paska Putaran Uruguay tahun 1994

a. In US\$ billion			b. In Percentage of total global gains		
Liberalizing regions	Benefiting regions	Agriculture and Food	Liberalizing regions	Benefiting regions	Agriculture and Food
Global North	HighIncome	110,5	Global North	43,4	4,4
Global South	LowIncome	11,6	Global South	4,6	12,3
All Countries	Total	122,1	All Countries	48,0	16,7

Sumber : Hans Biswanger (1999 : 255)¹⁷

Dari hasil pembacaan tabel tersebut, terdapat kontradiksi pendapatan yang melebar antara negara maju dan negara dunia ketiga sebagaimana pemaparan tabel tersebut. Negara maju memperoleh porsi persentase 43,4 persen dengan keuntungan 110,5 juta dollar, sementara negara

¹⁶ Stiglitz, Joseph, *Globalization and Discontent*, New Jersey : Norton Company, 2002, hlm 23.

¹⁷ Hans Binswanger, "The Evolution of World Bank's Land Policy", *World Research Observer* 14 : 2 (1999), hlm 249-275.

dunia ketiga hanya memperoleh sedikit keuntungan 4,6 persen dengan keuntungan 11,6 %. Ditinjau dari segi keunggulan komparatif, komoditas pertanian negara dunia ketiga memang kalah kualitas dengan produk serupa yang dihasilkan di negara maju. Petani di negara maju disubsidi oleh negaranya 10-15 juta dollar Amerika Serikat setiap tahun meliputi teknologisasi pertanian, penyediaan lahan pertanian yang berhektar-hektar, harga beli pemerintah terhadap komoditas pertanian tinggi, dan kebijakan proteksionisme terhadap produk yang sama dari negara dunia ketiga. Pemerintah negara maju membangun stigma bahwa produk negara dunia ketiga tidak layak konsumsi, mengandung bakteri mematikan, dan jorok pengolahannya demi mengalihkan konsumen memilih produk dalam negeri. Bandingkan dengan yang terjadi di negara dunia ketiga, petani dipaksa bertarung sendirian melawan liberalisasi komoditas negara maju. Petani di negara dunia ketiga lebih banyak merugi daripada untung karena komoditas pertanian mereka kalah bersaing di pasaran dan pemerintah tidak membentengi petani dari ancaman liberalisasi sehingga banyak di antara mereka kemudian menjual tanahnya kepada perusahaan multinasional dan menjadi buruh tani. Implikasi nyata dari hadirnya perdagangan bebas adalah kemiskinan struktural ditandai dengan menurunnya faktor produksi yang termarginalkan oleh hadirnya kekuatan transnasional. Maka, esensi utama yang dihadirkan dalam perdagangan bebas sebenarnya adalah kesempatan terbuka bagi negara maju untuk mengontrol sumber ekonomi yang tersebar di berbagai negara dunia ketiga dan kesempatan tertutup bagi negara maju untuk menghalangi komoditas dari negara dunia ketiga. Negara maju justru bersikap defensif dengan menaikkan kuota tarif terhadap komoditas negara dunia ketiga dalam arena perdagangan bebas yang diklaim sebagai arena ekonomi terbuka. Maka daripada menciptakan kesejahteraan dunia yang merata dan berkelanjutan antar berbagai negara untuk mereduksi ketimpangan ekonomi sebagai bentuk kolonialisme, negara maju cenderung untuk melindungi industri dalam negeri melalui kuota tersebut. Bank Dunia (2010 : 24) merilis laporan berjudul *World Development Indicators* menyebut penerapan tarif tinggi perdagangan di negara maju menghambat produk negara dunia ketiga seperti yang terlihat dalam tabel berikut

Tabel 4 : Kuota Tarif Tinggi Perdagangan Bebas di Negara Maju

The OECD Members apply very high tariffs selectively (percent)				
Countries	Years	Simple Average Tariffs Rate	Weighted Average Tariffs Rate	Maximum Tariffs Rate
Australia	2008	4	2	18
Kanada	2008	4	1	95
Islandia	2008	2	1	76
Jepang	2008	3	1	50
Korsel	2007	8	7	887
Selandia Baru	2008	3	2	13
Norwegia	2008	1	0	555
AS	2008	3	1	350
Uni Eropa	2008	2	1	75

Sumber : Bank Dunia, *World Development Indicators 2010* (2010 : 34) ¹⁸

¹⁸ Bank, World, *World Development Indicator 2010*, Washington D.C : World Bank Press, 2010, hlm 34.

Adanya kenaikan kuota tarif di negara maju sebagai wujud dari perdagangan bebas yang tidak menguntungkan, malahan merugikan utamanya negara dunia ketiga. Dunkley menggunakan model analisa Smithian – Ricardonian tentang keunggulan komparatif untuk membentuk tesis bahwa perdagangan bebas adalah mitos ekonomi yang dibuat membuat orang percaya bahwa semakin bebasnya ruang ekonomi. Mitos pertama yakni perdagangan bebas akan menguntungkan bagi setiap negara melalui pertukaran spesialisasi. Pada dasarnya era spesialisasi perdagangan kini telah berakhir, melalui perkembangan teknologi kini negara maju dapat memperoleh surplus dari ekspor barang jadi (*opportunity cost*) dan menekan biaya upah buruh (*labour cost*) melalui teknologisasi produksi dan rekayasa industri sehingga mampu menghasilkan keuntungan absolut. Mitos kedua, kebijakan perdagangan bebas melalui hadirnya merupakan strategi terbaik untuk mengurangi kemiskinan akut yang terjadi di negara–negara miskin melalui investasi dan industrialisasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Realitanya yang terjadi justru pengalihan (*displacement*) dan kerusakan (*disruptive*). Perusahaan multinasional sebagai motor perdagangan bebas tidaklah menghadirkan perdagangan bebas sebagai citra positif dengan memberdayakan masyarakat. Mereka hadir untuk mengeruk keuntungan dari komodifikasi secara privat atas sumber ekonomi di negara dunia ketiga dengan mempekerjakan masyarakat sebagai buruh murah dengan risiko kerja yang besar. Semakin masifnya komodifikasi privat atas sumber ekonomi publik di negara dunia ketiga mengakibatkan kerusakan dalam hal terciptanya konflik negara dan masyarakat akibat rusaknya lingkungan karena pola eksploitasi yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan.

Selain halnya kerusakan lingkungan, masalah lain yang lebih krusial adalah semakin menurunnya kesejahteraan penduduk karena negara mencabut subsidi tentang kebijakan-kebijakan sosial yang dipandang tidak menguntungkan negara. Globalisasi yang berkembang di penjuru dunia saat ini sudah merombak pola pikir negara. Negara dituntut untuk melakukan efisiensi pembiayaan sosial yang tidak dianggap menguntungkan demi membiayai persaingan di arena global. Logika kompetisi globalisasi yang kini membuat negara kian menjadi pelayan ekonomi daripada sosial. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai masalah kemiskinan yang ditimbulkan globalisasi di kawasan Selatan. Globalisasi memang menjadi arena menang dan kalah / kaya dan miskin yang menjadi karakteristik naturalnya, akan tetapi kalau yang menjadi korban adalah kawasan Selatan yang selama ini menjadi objek terjajah, maka hal itulah yang perlu dikritisi.

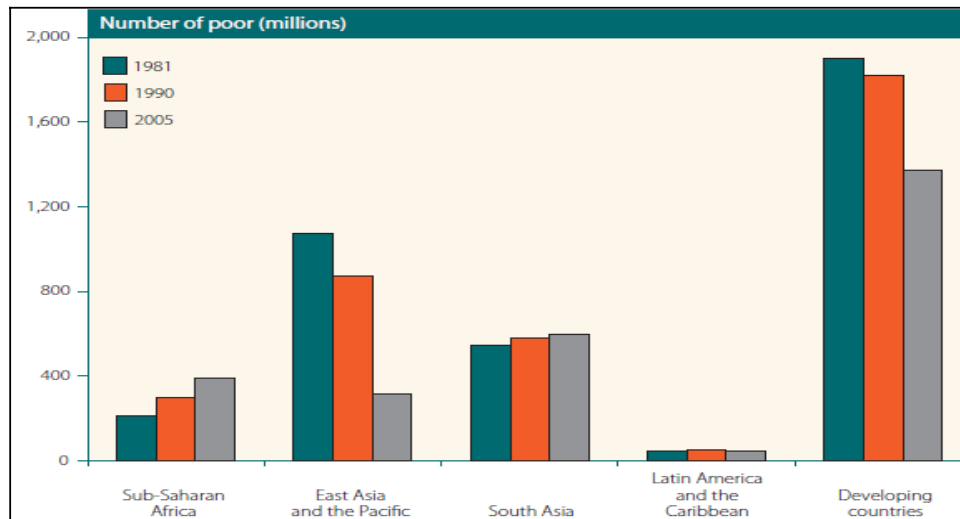
Kemiskinan di Selatan : Faktor Internal atau Eksternal ?

Apakah Globalisasi mengurangi kemiskinan ? (*does globalization reduce the poverty*) telah menjadi perdebatan sengit dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertanyaan tersebut setidaknya tertuju sehubungan dengan niat mulia para pemikir modernis yang mengatakan bahwa globalisasi akan membawa efek domino ketika kue ekonomi global terdistribusi merata di sejumlah negara membawa implikasi pada pengurangan kemiskinan maupun peningkatan lapangan pekerjaan bagi sejumlah tenaga kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi tinggi masih menjadi trend masa kini bagi setiap negara untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Negara berpacu untuk terus meningkatkan daya saing ekonomi mereka agar menarik perhatian para borjuasi internasional bersedia menginvestasikan kapitalnya maupun memberikan deregulasi berupa insentif stimulus ekonomi (e.g. *tax holiday, fiscal reduction*, maupun kebijakan lainnya). Namun yang menjadi

pertanyaan selanjutnya ialah, apakah dengan mengutamakan pertumbuhan yang kian naik maka berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan ?. Realitanya yang terjadi di lapangan justru malah berbanding terbalik dimana pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan.

Hal tersebut setidaknya dapat terindikasi dari laporan UNDP (2011) yang berjudul *World Economic and Social Survey* melaporkan 80 persen keberhasilan pembangunan manusianya dikuasai negara maju, sementara 20 persen sisanya negara dunia ketiga (UNDP, 2011 : 231). Pendapat serupa juga disampaikan oleh DESA (*Department of Economic and Social Affairs*) PBB dalam rilis laporannya yang berjudul *World Economic and Social Survey 2010* menyebutkan angka kemiskinan yang terdapat di negara-negara kawasan Selatan tidak menurun secara signifikan sejak neoliberalisme dikumandangkan sebagai ideologi “pembebasan” kemiskinan dunia melalui fundamentalisme pasar sejak 1980-an. Malahan di berbagai kawasan tertentu, angka kemiskinan ada yang naik misalnya saja kawasan Sub Sahara Afrika dan Asia Selatan yang mengalami kenaikan jumlah orang miskin dimana Sub Sahara, angka orang miskinnya mencapai 400 juta orang dan Asia Selatan telah melebihi angka 400 juta orang. Sementara Amerika Latin tidak beranjak dari angka 100 -250 juta orang. Adapun pengurangan radikal angka kemiskinan justru terjadi di Asia Timur yang merupakan NICs (*newly industrializing countries*) dimana angka kemiskinan bisa ditekan dari 1100 juta orang menjadi kurang dari 400 juta orang pada 2005. Selebihnya angka fluktuasi kemiskinan tersebut bisa terlihat dari tabulasi berikut ini

Tabel 5. : Trend Pengurangan Kemiskinan di Selatan 1981-2005



Sumber : *World Economic and Social Survey 2011* (2011 : 7)¹⁹

Dengan melihat berbagai varian data penelitian yang ditampilkan oleh kedua badan dunia tersebut, setidaknya kita memiliki pemahaman mendasar bahwa globalisasi tidak serta merta dapat mengurangi angka kemiskinan, malahan justru menambah seperti kasus Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Selain itu, angka kemiskinan kawasan Selatan secara kumulatif juga masih tinggi mencapai

¹⁹ UNDP, *World Economic and Social Survey 2011*, Washington D.C : UNDP Press, 2011, hlm 7.

1,200 juta orang. Lalu mengapa janji globalisasi sebagai cara ampuh mengatasi kemiskinan “kurang berhasil” diterapkan ?. Siapa aktor yang bisa dimintai pertanggungjawabannya ?. Jawaban atas pertanyaan tersebut memicu tiga pendekatan besar dalam mengurai permasalahan tersebut. Dalam hal ini, terdapat tiga pendekatan besar yakni paradigma bipolaristik-tradisional, paradigma Bretton Woods, dan paradigma PBB. Oleh karena itulah, mari kita tinjau satu-persatu ketiga pendekatan tersebut.

Pertama, pendekatan bipolaristik-tradisional. Pendekatan ini menilai bahwa ketidakberhasilan globalisasi dalam mengurangi kemiskinan di kawasan Selatan dikarenakan konteks perekonomian dunia lebih didominasi dan terdeterminasi oleh negara Utara. Sehingga kue ekonomi lebih banyak dikuasai oleh Utara sementara Selatan hanya disisakan residualnya saja. Dalam konteks pendekatan ini, dogma “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” menjadi lokus perhatian bagi pendekatan. Analisa penjelasan kemiskinan dalam pendekatan ini hadir dari berbagai kalangan seperti halnya Michael Chossudovsky dalam *Globalization of Poverty* yang menyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di Selatan merupakan sesuatu yang dibutuhkan untuk memperkuat *world orders* yang dijalankan negara Utara untuk menjalankan dominasinya²⁰. Kemiskinan seperti menjadi isu menarik untuk memperkuat *orders* tersebut paska perang dingin yang berakhir pada 1991. Setelah ideologi komunisme berhasil diberangus dan negara dunia kedua “resmi” terhapuskan dari geopolitik dunia dengan hanya menyisakan dua kutub, kemiskinan menjadi cara bagi Utara untuk melakukan intervensi-intervensi pembangunan di Selatan. Pembangunan lintas menjadi *orders* tersebut yang kemudian berkembang menjadi ideologi hegemonik. Namun demikian, pembangunan tersebut tidak ditujukan mengentaskan kemiskinan akan tetapi untuk membangun ekonomi. Akibatnya jurang antara kaya dan miskin menjadi kian menganga dimana Utara melalui ideologi pembangunannya menjadi makmur berkat investasi di Selatan dengan mengatasnamakan “pemberantasan kemiskinan” sementara Selatan kian menjadi miskin karena sumber ekonominya dijarah para borjuasi dan lembaga asing dari Utara. Oleh karena itulah, kemiskinan yang terjadi di Selatan menurut pendekatan ini lebih dikarenakan dari faktor eksternal dengan *orders* yang hegemonik. Maka, satu-satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan di Selatan adalah membentuk lembaga tandingan yang afirmatif terhadap isu Selatan karena selama ini lembaga dunia cenderung memihak pada kepentingan negara-negara Utara.

Kedua, pendekatan Bretton Woods menekankan pada faktor internal yakni pola salah urus perekonomian yang dilakukan oleh negara sehingga menyebabkan kemiskinan bagi penduduknya. Premis tersebut setidaknya dapat kita baca manakala melihat data yang ditampilkan oleh berbagai lembaga dunia seperti OECD papers, TRIPs dari IMF, maupun *World Economic Index* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Lembaga-lembaga ini menilai bahwa intervensi ekonomi yang dilancarkan negara justru menghasilkan inefisiensi bagi pengembangan ekonomi. Inefisiensi muncul lantaran negara mensubsidi secara masif penduduk melalui berbagai tunjangan sosial sehingga menimbulkan pembengkakan anggaran dan berpotensi defisit. Masyarakat menjadi kian tergantung terhadap negara secara ekonomi melalui subsidi dan akan menimbulkan depresi ekonomi dalam skala besar. Sehingga angka kemiskinan akan semakin bertambah pesat. Oleh karena itulah, cara efektif untuk mengatasi itu semua adalah dengan melakukan liberalisasi pasar dalam menjalankan

²⁰ Chossudovsky, Michael, *Globalization of Poverty*. Ottawa : CNG Press, 2003, hlm 8.

fungsi ekonomi. Liberalisasi pasar dipandang adil dalam melakukan redistribusi ekonomi bagi masyarakat sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya. Kemiskinan dihitung berdasar pendapatan dimana standar Bank Dunia menetapkan bahwa orang yang berupah kurang dari USD 1,25-2 merupakan orang miskin dan selebihnya adalah orang mampu. Namun demikian

Ketiga, pendekatan PBB. Pendekatan ini mengakumulasikan kedua hal tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal sebagai penyebab kemiskinan di kawasan Selatan. Faktor internal yakni kondisi perekonomian dunia yang didominasi mobilitas kapital negara-negara Utara sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan global bagi kawasan Selatan. Sedangkan, faktor eksternal sendiri dimaknai sebagai perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat maupun pola salah urus ekonomi yang lebih melayani kepentingan asing daripada ekonomi nasional sendiri. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, ideologi pengentasan kemiskinan dirumuskan kembali dari semula berbasis *economic development* kini beralih pada *human development* berbasis keberlanjutan dengan memperluas skope pengentasan kemiskinan dalam indikator yang meluas. Berbagai program tersebut sudah dan akan berjalan, salah satunya MDGs yang kini berlangsung hingga 2015.

Terlepas dari berbagai pendekatan yang ada, kemiskinan di Selatan sudah selayaknya untuk direduksi dengan memperkuat kemitraan Utara-Selatan untuk duduk bersama dalam satu forum resmi. Saya sendiri melihat bahwa rumusan tentang kemiskinan perlu untuk dirumuskan bersama karena selama ini indikator kemiskinan ada berbagai macam. Para pemikir dari Utara lebih cenderung menggunakan pendekatan material-ekonomi seperti indikator OECD yang menerapkan pendapatan perkapita USD 10.700 sebagai pembatas negara kaya dan miskin sedangkan Selatan lebih condong pada pendekatan GHI (*Gross Happiness Index*) yang mengutamakan aspek kualitatif kehidupan. Seperti yang pada terjadi di kasus Bhutan dimana secara ekonomi, negara itu negara miskin karena pendapatan perkapita penduduknya hanya USD 600 per tahun. Namun, Bhutan sendiri mengklaim dirinya sebagai negara yang berbahagia karena penduduknya hidup berkecukupan. Dalam hal ini, membicarakan pendapatan perkapita sebagai indikator kemiskinan memang menjadi ulasan untuk membicarakan ketimpangan Utara-Selatan karena angka-angkanya sangat mencolok untuk menunjukkan mana negara kaya dan negara miskin.

Ketimpangan Pendapatan dan Krisis Hutang

Hal yang ingin saya tekankan berkaitan dalam tulisan ini adalah “hutang merupakan ibu dari segala macam krisis” (*debt is all mother of crisis*). Hutang terlebih lagi hutang luar negeri setidaknya jangan ditempatkan dalam koridor restrukturisasi dan rehabilitasi perekonomian, namun juga kita perlu menempatkan masalah hutang tersebut dalam koridor kuasa politik. Deskripsi hutang sebagai alat politik atau dalam konteks ini dimaknai alat bagi Utara menekan Selatan sudah dilakukan sejak 1982. Dalam tahun tersebut, bisa dibilang merupakan awal “konflik” Utara-Selatan hingga kini yang berawal dari kasus pinjaman lunak yang dilakukan IDA (*International Development Agency*) untuk membiayai berbagai program pembangunan di kawasan negara dunia ketiga. Pinjaman lunak tersebut berasal sirkulasi deposito dana petrodollar yang disimpan di berbagai bank-bank Barat sebagai pinjaman bagi negara dunia ketiga. Pada saat yang sama, terjadilah Perang Yom Kippur antara Arab dan Israel sehingga memicu adanya kenaikan harga minyak dunia. Perang tersebut juga memicu negara-negara Arab jor-joran mengambil uang deposito petrodollar mereka di bank-bank Barat untuk membeli alutsista persenjataan dalam menghadapi Israel sehingga mengakibatkan dana

pinjaman yang biasa digunakan IDA habis (Sahle, 2010 : 30). Maka kondisi tersebut mendorong IDA untuk “memaksa” dana pinjaman yang dipinjam sebagai proyek pembangunan untuk dikembalikan, namun kondisi itu tak memungkinkan bagi pemerintahan negara dunia ketiga yang baru memulai menggunakan dana tersebut sudah harus dikembalikan. Perekonomian mereka juga masih labil untuk menopang pembangunan negara. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah negara dunia ketiga mengalami krisis hutang.

Amerika Serikat melihat krisis hutang tersebut sebagai peluang untuk mempromosikan ideologi reformasi pasar di kawasan Selatan melalui program penyesuaian struktural (*structural adjustment programme*) / SAPs. Melalui SAPs tersebut, diharapkan dapat mengembalikan dana hutang negara dunia ketiga yang dipinjam dari IDA, IMF, Bank Dunia, maupun lembaga donor lainnya dengan melakukan serangkaian reformasi kebijakan misalnya saja orientasi produksi berbasis ekspor, pemotongan subsidi sosial, maupun privatisasi. Dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima, krisis hutang tersebut akan segera direduksi.

Namun dalam berbagai perkembangan selanjutnya, SAPs sendiri kemudian menjadi kontradiksi terlebih implikasinya yang ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kegagalan SAPs dalam mengurangi krisis hutang Selatan terindikasi dari penurunan pendapatan perkapita yang mencapai 18 % di 24 negara berkembang, penurunan pertumbuhan ekonomi sebanyak 20 % di negara berkembang dalam rentang 1980-2003, dan menurunnya volume ekspor di 13 negara dari 24 berkembang dalam kurun waktu yang sama²¹. Konsep SAPs sendiri bukannya membantu, malahan justru kian memperkuat absorsi kekayaan lebih intens ke Utara dengan memanfaatkan kondisi ekonomi Selatan yang masih lemah ditambah ketergantungan ekonomi terhadap teknologi dan komoditas lainnya. Orientasi produksi berbasis ekspor bisa dibilang merupakan konspirasi bagi Barat untuk memperkuat dominasinya di Selatan karena produk-produk dari Selatan sendiri dilarang masuk karena proteksionisme, sementara komoditas negara maju sendiri merajalela di pasaran.

Sebagai gambaran, SAPs sendiri berimplikasi pada memburuknya perekonomian di Selatan melalui pembengkakan krisis hutang eksternal di Selatan dapat kita lihat dalam tabulasi hutang-hutang negara Selatan dalam tabel 6.

Dalam situasi globalisasi kontemporer, krisis hutang juga kian menganga bahkan lebih besar daripada era sebelumnya. Dalam lansiran laporan resmi Bank Dunia (2012) yang berjudul *Global Development Financial* menyebutkan krisis hutang negara-negara berkembang dipicu berbagai hal seperti menurunnya kegiatan ekspor-impor komoditas perdagangan antara negara maju dan berkembang yang diakibatkan resesi global pada 2008, membengkaknya pengeluaran anggaran negara untuk membiayai dana sosial dan talangan ekonomi agar perekonomiannya tidak jatuh, maupun tingkat pengangguran yang kian besar karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kesemuanya tersebut kemudian berdampak pada kenaikan hutang eksternal di kawasan Selatan seperti yang tertera dalam tabel 7.

²¹ Bello, Walden, *Dark Victory : United States and Global Poverty*, Manila : Food First Book, 2003, hlm 33.

Tabel 6. : Total Komparasi Perbandingan Hutang Selatan pada 1980-1990

	<i>Total External Debt (Millions Of \$US) 1990</i>	<i>Total External Debt (as a % of GNP) 1980</i>	<i>Debt Service (as a % of Exports) 1980</i>	1990
Algeria	26,806	47.1	27.1	59.4
Argentina	61,144	48.4	37.3	34.1
Bolivia	4,276	93.3	35.0	34.1
Brazil	116,173	31.2	63.1	20.8
Bulgaria	10,927	1.1	0.3	56.9
Congo	5,118	98.0	10.8	20.7
Cote d'Ivoire	17,956	58.8	28.3	38.6
Ecuador	12,105	53.8	33.9	33.2
Mexico	96,810	30.5	49.5	27.8
Morocco	23,524	53.3	32.7	23.4
Nicaragua	10,497	112.1	22.3	4.1
Peru	21,105	51.0	46.5	11.0
Poland	49,386	16.3	17.9	4.9
Syria	16,446	27.1	11.4	26.9
Venezuela	33,305	42.1	27.2	20.7

Sumber : Vincent Ferraro dan Mellisa Rosser (1994 : 323)²²

Tabel 7. : Kenaikan Hutang Luar Negeri Negara Selatan 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total External Debt Outstanding	2,514.1	2,675.3	3,220.5	3,499.2	3,639.6	4,076.3
Long-term (including IMF)	2,013.2	2,081.5	2,456.5	2,739.7	2,866.4	3,039.9
Public and publicly guaranteed (including IMF)	1,332.1	1,266.2	1,371.3	1,423.2	1,530.4	1,647.2
Private nonguaranteed	681.1	815.4	1,085.1	1,316.5	1,336.0	1,392.7
Short-term external debt	500.8	593.8	764.0	759.5	773.2	1,036.4
<i>Ratios</i>						
External debt outstanding to GNI (%)	26.6	23.9	23.2	21.0	22.4	21.0
External debt stocks to exports (%)	75.9	66.1	65.6	59.3	77.0	68.7
Reserves to external debt outstanding (%)	78.7	97.8	114.9	118.7	132.9	137.1
Short term debt to imports (%)	15.3	15.2	16.0	13.0	16.2	17.2

Sumber : Global Development Financial 2012²³

²² Michael Klare, Daniel Thomas, *World Security: Challenges for a New Century*, New York : St. Martin Press, 1994, hlm 323.

²³ Bank, World, *Global Development Financial 2012*, Washington : World Bank Press, 2012, hlm 36.

Tentunya dengan melihat tabulasi berikut, krisis hutang benar-benar kian menggerogoti anggaran maupun perekonomian bagi kawasan negara Selatan. Dilihat dari total pengembalian hutang publik maupun privat yang harus dikembalikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang kepada IMF mengalami kenaikan 3 – 5 % tiap tahunnya. Namun interval angka 3-5 % belum seberapa “mengerikan” apabila dikoversikan dalam rasio anggaran negara baik yang ada di anggaran nasional kotor (*gross national index*) yang telah melebihi batas normal kewajaran penyehatan anggaran yang dipatok dalam angka 10 % berikut bunga yang harus bayarkan mencapai 137, 4 % persen dari anggaran nasional, juga hutang perdagangan yang naik hampir 20 % tiap tahunnya. Sebuah angka tidak wajar bagi negara Selatan yang mayoritas masih negara miskin dan perekonomiannya masih belum stabil untuk diajak berkompetisi dalam arena globalisasi. Maka dengan melihat berbagai fakta yang ada dalam ketimpangan globalisasi antara utara dan selatan sendiri, masihkah kita percaya globalisasi membawakan semangat keuntungan bagi semuanya (*benefited for all*) seperti yang dikatakan Kenichi Ohmae maupun globalisasi membawakan pencerahan ekonomi sebagaimana yang dikatakan Giddens dan kawan-kawannya dari kalangan modernitas. Pembangunan yang menjadi inti dari globalisasi sendiri membawa pola-pola dikotomis dalam implementasinya yakni *core* (maju) dan *periphery* (pinggiran) untuk membagi negara dunia masih berpengaruh dalam konteks kekinian. Adanya dikotomi *global north* dan *global south* pada era globalisasi sekarang ini merupakan kontinuitas dari gagasan pembangunan dari era sebelumnya.

Negara Selatan (*global south*) yang dicitrakan sebagai negara miskin dan berkembang dari proses dekolonisasi merupakan objek implementasi dari pembangunan ekonomi tersebut. Mulai dari SAPs hingga yang terakhir kini MDGs semua menaruh Selatan menjadi objek yang perlu didudukan dan didisplinkan oleh kelompok Utara. Namun dalam realitanya seperti yang saya tunjukkan indikator kemiskinan, hutang, dan pendapatan nasional sendiri berjalan timpang bahkan kian mendalam efek ketimpangannya dalam pembangunan di Selatan. Namun demikian, globalisasi berikut pembangunan ekonominya selalu terlepas dari dosa-dosa ekonomi politik yang diperbuatnya. Dosa-dosa seperti ketimpangan, penindasan ekonomi, maupun kemiskinan selalu direproduksi secara berulang kali dalam berbagai produk wacana yang intinya intervensi Utara ke Selatan dalam memberantas itu semuanya. Seolah Utara tidak pernah dipersalahkan atas dosa-dosa tersebut dan selalu tampil kembali dengan wajah optimistik meskipun di akhir nanti bersikap diskriminatif yakni dosa itu terjadi karena Selatan. Anehnya meskipun kemiskinan telah menjadi *global concern* bagi Utara untuk melakukan intervensi ke Selatan, kemiskinan sendiri tidak serta merta melambat bahkan ada di berbagai kasus justru kian naik. Hal ini jelas membuktikan bahwa dimensi pembangunan ekonomi yang terdapat dalam globalisasi sendiri ini sarat dengan relasi dominasi kekuasaan kelompok-kelompok internasional yang memainkan isu ketimpangan sebagai alat masuknya Utara ke Selatan. Dominasi Utara tersebut dikukuhkan baik secara aliansi maupun dalam kelembagaan internasional. Pada akhirnya, dominasi tersebut mengarah kepada praktik-praktik imperialisme global yang mengarah pada rekolonialisasi. Rekolonialisasi tersebut berwujud pada terbentuknya pemerintahan global (*global governance*) yang sifatnya formal maupun informal, namun berpengaruh dalam menentukan kebijakan ekonomi-politik dunia. Paradigma rekolonialisasi sendiri menuntun kita pada aspek sejarah terbentuknya globalisasi yang merupakan ekspansi kapitalisme yang mengalami kontinuitas dari dulu hingga sekarang. Dalam tulisan bab berikutnya,

saya akan memaparkan praktik dominasi Utara tersebut berikut bagaimana operasionalisasinya di negara-negara Selatan

Kesimpulan

Hal yang bisa dapat disimpulkan dari penjabaran *paper* ini adalah ketimpangan yang terjadi antara dunia pertama dan dunia ketiga dalam era globalisasi sekarang ini merupakan legasi dari praktik kolonialisme dan imperialisme Barat yang terjadi di masa lampau. Dalam era globalisasi sekarang ini, kolonialisme sendiri diwujudkan dalam penguasaan kontrol kapital besar yang bergerak antar bangsa dan negara. Negara maju sendiri kemudian diuntungkan dengan kondisi tersebut dimana mereka memiliki keunggulan komparatif dengan penguasaan teknologi dan perbankan sementara negara dunia ketiga sendiri hanya mengandalkan hasil sumber daya ekstratif. Namun demikian, pertukaran risorsis antar kedua aktor tersebut tidaklah dalam posisi setara. Negara maju sendiri diuntungkan dengan regulasi perdagangan internasional yang mana bisa memiliki hak veto dalam alur perdagangan. Kondisi tersebut kontras dengan negara dunia ketiga yang berada dalam posisi menerima dan tidak mempunyai suara yang diminimalisir negara maju. Akibatnya yang terjadi kemudian adalah kemiskinan, hutang meningkat, maupun ekses negatif lainnya yang menempatkan negara dunia ketiga sendiri sebagai negara miskin. Oleh karena itulah, diperlukan solusi yang adil dalam dalam konteks perekonomian maupun perdagangan internasional yang menempatkan dua aktor tersebut dalam posisi setara. Setidaknya hal itu bisa dimulai dengan merombak regulasi maupun kepengurusan lembaga-lembaga internasional yang notabene masih dikuasai negara maju. Negara dunia ketiga perlu diberi tempat untuk mendapatkan kue globalisasi yang setara dengan negara maju pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Amin, Samir. 2011. *Global History : A View From The South*. Nairobi : Pambazuka Press.
- Arif, Sritua. 2006. *Negeri Terjajah : Menyingkap Illusi Kemerdekaan*. Yogyakarta : Resist Books.
- Binswanger, Hans. 1999. "The Evolution of World Bank's Land Policy", *World Research Observer* , 14 (2) : 249-275.
- Berberoglu, Berch. 2010. *Globalization in The 21st Century*. New York : Palgrave.
- Berger, Mark. 2004. *The Battle of Asia : From Decolonization to Globalization*, London : Routledge.
- Berger, Mark. 2004. "After The Third World ? History, Destiny, and The Fate of Third Worldism", *Third World Quarterly*, 25 (1) : 9-39.
- Bello, Walden. 2003. *Dark Victory : United States and Global Poverty*. Manila : Food First Book.
- Callinicos, Alex. 2009. *Imperialism and Global Political Economy*. Cambridge : Polity Press.
- Chossudovsky, Michael. 2003. *Globalization of Poverty*. Ottawa : CNG Press.
- Glenn, John. 2007. *Globalization : North-South Perspective*, London : Routledge.
- Hoogvelt, Ankie. 2001. *Globalization and The Postcolonial World*, London: Palgrave.
- Khor, Martin. 2005. *Globalisation and the South: Some Critical Issues*. Penang : Third World Networks.
- Kiely, Ray, dan Phil Marfleet, 2005. *Globalisation and Third Worlds*, New York : Taylor and Francis Group.

- Klare, Michael, dan Daniel Thomas, 1994. *World Security: Challenges for a New Century*, New York : St. Martin Press.
- Pieterse, Jan Nederveen 2004. *Globalization or Empire*, London : Routledge.
- Pollard, Jane, dan Cheryl McEwan, 2011. *Postcolonial Economies*, New York : Zed Books.
- Stiglitz, Joseph. 2002. *Globalization and Discontent*, New Jersey : Norton Company.
- Stevens, Jacqueline. 2006. "Recreating the State", *Third World Quarterly*, 27 (5) : 755-766.
- Therien, Jean-Philippe. 1999. "Beyond the North-South divide: the two tales of world poverty", *Third World Quarterly*, 20(4) : 723-742.
- Third World Countries, 2012. "Third World Countries" dalam upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/Cold_War_alliances_mid-1975.svg [diakses 8 Agustus 2012].
- Developing Countries, 2012. "Developing Countries" dalam en.wikipedia.org/wiki/File:Developed_nation [diakses 7 Agustus 2012].
- United Nations Development Program (UNDP), 2011. *World Economic and Social Survey 2011*.
- World Bank, 2010. *World Development Indicator 2010*.
- World Bank, 2012. *Global Development Financial 2012*.